

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brazil adalah rumah bagi salah satu hutan terbesar di dunia, misalnya hutan Amazon. Brazil juga membuat kemajuan penting melawan deforestasi ilegal di akhir tahun 2000-an. Pada tahun 2012, laju deforestasi turun sebesar 84% dibandingkan dengan puncak tahun 2004.¹ Namun sejak itu, laju deforestasi kembali meningkat pada periode Agustus 2020 hingga Juli 2021. Deforestasi meningkat sebesar 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi sejak 15 tahun.

Pada tahun 2020, kasus kebakaran hutan diidentifikasi hampir 223.000 kejadian dan dilaporkan angka tertinggi terjadi dalam satu dekade.² Laju deforestasi yang terjadi saat ini menjadikan Amazon berada pada ambang perubahan penyerap karbon bersih. Kerusakan yang ditimbulkan akibat kebijakan hutan dan perluasan padang rumput untuk keperluan produksi daging sapi, lahan pertanian yang dipergunakan untuk kedelai dan minyak sawit, dan semakin meningkatnya aktivitas konversi hutan primer menjadi hutan yang dialihfungsikan sebagai hutan tanaman untuk pembuatan kertas dan ampas kertas menjadi pendorong utama deforestasi yang berimplikasi pada kerusakan penyerapan

¹ Silva Junior et al, 'The Brazilian Amazon Deforestation Rate in 2020 is the Greatest of the Decade,' *In Nature Ecology and Evolution*, 2021, Vol. 5, No. 2 (2021), h. 144-145.

² Silva Junior.

karbon bersih. Menurut data yang dikeluarkan oleh OWID tiga perempat deforestasi hutan tropis yang terjadi di Brazil diperparah oleh peternakan sapi.³

Dilihat dari sektor energi, penyebab yang jelas mengkhawatirkan adalah perencanaan infrastruktur energi Brasil, yang secara tidak perlu terus memasukkan bahan bakar fosil, termasuk batu bara dan gas. Pada catatan yang lebih positif, tren pasar untuk pembangkit listrik terbarukan sedang menuju ke arah yang lebih baik dalam hal peningkatan yang stabil dalam kapasitas angin dan surya.⁴ Karena pangsa pembangkit listrik tenaga air yang sangat tinggi, Brasil memiliki salah satu pangsa energi terbarukan tertinggi secara global (82% dari campuran pembangkitan), yang menyebabkan tingkat emisi yang relatif rendah dari sektor listrik.⁵ Hal ini juga tercermin dalam Indeks Daya Tarik Negara Energi Terbarukan terbaru, di mana Brasil naik dari peringkat 15 ke peringkat 11 pasar paling menarik di dunia untuk energi terbarukan⁶.

Namun, ketergantungan yang tinggi pada pembangkit listrik tenaga air juga menimbulkan risiko, seperti yang ditunjukkan oleh pembangunan bendungan Belo Monte di Pará. Bendungan besar (dengan kapasitas operasional penuh sebesar 11.233 MW) telah menimbulkan kerusakan sosial lingkungan yang signifikan terhadap Sungai Xingu dan masyarakat adat yang tinggal di sampingnya sementara sejauh ini tidak dapat menghasilkan total listrik yang

³ Hannah Ritchie & Max Roser, Our World in Data, “Forests and Deforestation” dalam <https://ourworldindata.org/drivers-of-deforestation>, diakses pada 25 Februari 2022.

⁴IRENA, ‘Renewable Capacity Statistics 2021’, dalam <https://www.irena.org/publications/2021/March/Renewable-Capacity-Statistics-2021>, diakses pada 25 Februari 2022.

⁵ International Energy Agency, “E4 Country Profile: Energy Efficiency in Brazil”, dalam <https://www.iea.org/articles/e4-country-profile-energy-efficiency-in-brazil>, diakses pada 25 Februari 2022.

⁶ EY Global, “Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI)”, dalam https://www.ey.com/en_gl/recai, diakses pada 25 Februari 2022.

dijanjikan oleh pembangunnya (nilai tertinggi yang dihasilkannya tahun 2019 sebesar 6.882 MW). Alasan yang terakhir adalah berkurangnya aliran Xingu karena deforestasi regional dan kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim, yang selanjutnya memotong pembangkit listrik⁷.

Seperti yang disebutkan di atas, Brasil menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan suhu dan kenaikan permukaan laut dapat mengubah ekosistem di Amazon, seperti berdampak pada keanekaragaman spesies dan meningkatkan frekuensi dan intensitas kekeringan. Efek kumulatif ini memungkinkan berimplikasi pada mata pencaharian masyarakat setempat, khususnya di wilayah-wilayah yang lebih miskin. Dengan demikian, dua pertiga populasi menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan di tempat tinggal mereka.

Masyarakat asli Amazon telah mengalami beberapa dampak dari perubahan iklim. Kerusakan hutan berdampak negative pada sumber makanan mereka, hal ini membuat mereka menjadi lebih sulit dalam mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang disediakan oleh hutan hujan Amazon. Dampak lain yang ditimbulkan dari perubahan iklim ini adalah kekeringan dan kebakaran hutan, yang dapat menjadi bencana bagi kelangsungan hidup mereka.

Kelompok adat Amazon menghadapi dampak perubahan iklim yang berbeda. Masyarakat adat Amazon sangat rentan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam yang disediakan oleh hutan hujan Amazon. Namun meskipun demikian, kelompok-

⁷ Tiffany Higgins, Mongabay, 'Belo Monte boondoggle: Brazil's biggest, costliest dam may be unviable' dalam <https://news.mongabay.com/2020/01/belo-monte-boondoggle-brazils-biggest-costliest-dam-may-be-unviable/>, diakses pada 25 Februari 2022.

kelompok ini seringkali memiliki akses terbatas pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan iklim, meskipun merekalah yang paling menderita dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut. Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan secara drastis lebih tinggi dalam beberapa abad terakhir, hal ini menyisakan kelompok-kelompok pribumi di Amazon harus menanggung derita tersebut.

Namun meskipun demikian, masyarakat adat seringkali memiliki akses terbatas pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan iklim, meskipun merekalah yang paling menderita dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut. Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan secara drastis lebih tinggi dalam beberapa abad terakhir, hal ini menyisakan kelompok-kelompok pribumi di Amazon harus menanggung derita tersebut. Sehingga dengan adanya peran organisasi atau lembaga yang memperjuangkan kepentingan hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting bagi mereka, seperti organisasi non-pemerintah APIB (*Articulação dos Povos Indígenas do Brasil*) atau Artikulasi Masyarakat Adat Brasil. kelompok APIB memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dari kerusakan lingkungan akibat deforestasi yang dapat memperparah perubahan iklim. Hal ini dinilai karena masyarakat adat sangat bergantung pada ekosistem yang di sediakan Amazon, sehingga kerusakan seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan pengundulan hutan di kawasan tertentu dianggap dapat mengganggu hak masyarakat adat atas mereka.

Oleh karena itu, latar belakang tersebut peneliti ingin menganalisis peran kelompok *Articulation of Indigenous Peoples of Brazil* (APIB) terhadap

pelanggaran hak asasi manusia akibat deforestasi pada masyarakat adat di Brazil. Hal ini menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana peran APIB berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat serta melihat bagaimana koordinasi APIB bersama organisasi internasional dan organisasi non-negara masyarakat adat lainnya. Karena bagi masyarakat adat, deforestasi tidak hanya masalah kerusakan lingkungan yang dapat berpengaruh pada kehidupan mereka, tetapi juga adanya alasan spiritual yang mereka yakini untuk menjaga dan melindungi hutan dari aktivitas deforestasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang diulas dalam latar belakang, penulis merumuskan pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana peran *Articulation of Indigenous Peoples of Brazil* (APIB) dalam mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Deforestasi pada Masyarakat Adat di Brasil?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompleksitas dampak deforestasi terhadap masyarakat adat di Brasil. Selain itu, mengetahui peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi akibat deforestasi pada masyarakat adat di Brasil.

1.3.2. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori Hubungan Internasional terutama yang berkaitan dengan Teori Hubungan Transnasional

serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan teori-teori tersebut, menambah pengetahuan, dan dapat menjadi sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan atau pengetahuan tentang dampak deforestasi bagi masyarakat adat di Brasil dan peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia pada masyarakat adat di Brasil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia pada masyarakat adat di Brasil.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam dunia internasional, isu lingkungan menjadi satu permasalahan krusial yang harus diselesaikan oleh Negara. Dalam penyelesaiannya tentu tidak hanya membutuhkan peran Negara saja, melainkan organisasi internasional pemerintah maupun non-pemerintah, komunitas atau lembaga swadaya masyarakat bahkan masyarakat sipil secara individu. Dengan kata lain, Permasalahan kerusakan lingkungan membutuhkan peran semua elemen dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai peran organisasi non-pemerintah yaitu *Articulation of Indigenous Peoples of Brazil* (APIB) dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia akibat perubahan iklim yang terjadi di Brazil. Sehingga untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan APIB tersebut, peneliti melakukan kajian kepustakaan dengan merujuk dan

menggunakan berbagai sumber referensi dan penelitian sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

Literature Review pertama berupa jurnal (2020) yang berjudul “*Being a Leader, A Woman and Indigenous: Three Challenges, Three Barriers*” (Maryuri Mora Grisales dan Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz).⁸ Jurnal ini membahas mengenai wawancara Angela Amankawa Kaxuyana (AAK). Dalam pembahasannya, jurnal ini membahas beragam masalah seperti tanggapan AAK mengenai masalah efisiensi penanganan pandemik covid-19 pemerintah Brasil. Oleh karena itu, literatur ini hanya menekankan pada pembahasan yang hanya berkorelasi dengan penelitian ini. AAK merupakan seorang pemimpin dari Amazon Brasil, orang Kahyana dari cagar alam Kaxuyana Tunayana yang terletak di ujung utara negara bagian Pará, di perbatasan Brasil-Suriname. Dia adalah anggota tim koordinasi eksekutif dari *Coordenação das Organizações dos Indígenas da Amazônia Brasileira* (COIAB atau Komite Koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Amazon Brasil), sebuah organisasi anggota *Articulação dos Povos Indígenas do Brasil* (APIB atau Koalisi Masyarakat Adat Brasil).

Angela Amankawa Kaxuyana membahas pengalaman pribadinya sebagai seorang aktivis dan pembela hak-hak masyarakat adat, berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh masyarakat ini di Brasil saat ini dan pentingnya meningkatkan kesadaran di antara orang-orang di Brasil dan di luar negeri atas pelanggaran sistematis hak asasi manusia masyarakat adat yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh negara atau pemerintah, serta isu-isu lainnya.

⁸ Maryuri Mora Grisales & Arquias Sofocles, “Being a Leader, a Woman and Indigenous: Three Challenges, Three Barriers”, dalam *International Journal on Human Rights*, Vol. 17, No. 30, (2020), h. 19-26.

Peran AAK dalam menumbuhkan kesadaran tersebut dengan melakukan kampanye di Eropa agar suara penduduk asli didengar dan mencegah pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan peningkatan aksi deforestasi. Aksi ini tidak hanya terhenti pada isu lingkungan saja, tetapi juga merambah pada isu sosial seperti rasisme. Dalam memerangi rasisme AAK memperluas aliansi dengan organisasi dari segmen lain seperti *Marcha das Mulheres Indígenas* (Pawai Perempuan Adat) hingga pertemuan *Marcha das Margaridas* (Pawai Bunga Aster), atau dengan *Movimento Sem Teto* (gerakan tunawisma), dan lain-lain. Kerja sama ini dilakukan agar aliansinya tetap kuat dan dapat berjuang bersama. Sedangkan peran dari organisasi pribumi Brasil seperti COIAB dan APIB yaitu menyediakan ruang hukum dan mengurus semua kebutuhan hukum masyarakat adat.

Literature Review kedua berupa Tesis (2021) yang berjudul “*Indigenous Interest in International Trade Governance: A Case Study of APIB and the EU-Mercosur Trade Agreement*” (Emilia Hallström).⁹ Tesis ini membahas mengenai lembaga kelompok masyarakat adat dalam tata kelola perdagangan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mempengaruhi pengambilan keputusan internasional yang dapat menguntungkan masyarakat adat dalam hal pembangunan berkelanjutan. Studi kasus yang diangkat oleh penulis dalam tesis tersebut yaitu APIB (Artikulasi Masyarakat Adat Brasil) dalam perjanjian EU-Mercosur.

⁹ Emilia Hallstrom, “Indigenous Interest in International Trade Governance: A Case Study of APIB and the EU-Mercosur Trade Agreement”. *Tesis*. (International Relations, Department of Global Political Studies Bachelor Program, Malmo University, 2021).

Perjanjian EU- Mercosur dalam hal ini merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas yang mewujudkan tiga pilar sektoral, termasuk di dalamnya membahas klausul tentang perubahan iklim dan masyarakat adat. Namun, perjanjian Mercosur memiliki kritik karena gagal dalam uji keberlanjutan, terutama di bidang inklusi lokal, perubahan iklim, transparansi, penegakan dari cendekiawan, negara anggota dan aktor non-negara. Perjanjian Mercosur dinilai bukanlah kekuatan pendorong untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bagi sebagian besar penduduk asli. Temuan dari tesis ini mendapatkan bahwa APIB, menggunakan strategi *framing*, membangun aliansi dan membentuk koalisi advokasi transnasional untuk meningkatkan visibilitas kepentingan kelompok pribumi Brasil. Upaya framing dalam masalah lingkungan dan penggunaan norma-norma internasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Brasil, terutama pelestarian amazon untuk meningkatkan kepentingan APIB dalam menghentikan EU- Mercosur. Sedangkan dalam aksi koalisi yang dibentuk oleh APIB yaitu dengan menciptakan konflik di antara negara-negara anggota UE yang mengakibatkan kebuntuan dalam proses ratifikasi. Situasi ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat adat Brasil dalam mencapai kepentingannya dari non-ratifikasi.

Literature Review ketiga berupa Buku (2020) yang berjudul “ *The Local and the Digital in Environmental Communication*” (J. Díaz-Pont et al). Pada bagian yang berjudul “ *Old Power Struggles and New Media Work: Indigenous Peoples Striving for Justice in Contemporary Brazil*” yang ditulis oleh Camila

Emboava Lopes dan Annika Egan Sjölander.¹⁰ Dalam bagian tersebut, penulis menganalisis mengenai bentuk perlawanan yang diartikulasikan untuk melawan pandangan hegemonik yang melegitimasi penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat adat di Brasil. Tujuannya untuk menggarisbawahi bagaimana masyarakat adat dan aktivis media membangun adat kontemporer untuk mengartikulasikan identitas mereka di platform media sosial, khususnya Facebook. Artikulasi yang dilakukan juga membahas gagasan mengenai penggunaan tanah dan alam/budaya. Selain itu, hal yang dikaji pada bab ini juga membahas mengenai konteks digital dan bagaimana sarana komunikasi mempengaruhi dinamika antara tingkat lokal, nasional dan global yang ada hubungannya dengan kekuasaan sebelum mengenal jaman penggunaan internet secara luas. Penulis memberikan konteks permasalahan berupa iklim politik di masa pemerintahan presiden Bolsonaro dengan fokus pada masyarakat adat dan perjuangan mereka atas tanah mereka.

Temuan dari penelitian ini bahwa aktivis media APIB dan Radio Yandê mengonstruksikan suara pribumi dengan membuat klaim tegas tentang hak tanah yang mengacu pada ketergantungan mereka dengan tanah dan alam. Mereka juga mengusulkan dekolonisasi radikal atas makna kepemilikan tanah. Perjuangan klain tersebut memanfaatkan media digital dengan pola menyerukan dukungan, dorongan mobilisasi dan aliansi serta kinerja identitas dan klaim mereka. Artikulasi tersebut juga dilakukan antara gerakan masyarakat adat lokal dan

¹⁰ Camila Emboava & Annika Egan, “Old Power Struggles and New Media Work: Indigenous Peoples Striving for Justice in Contemporary Brazil”, Dalam J. Díaz-Pont et al (eds.), “*The Local and the Digital in Environmental Communication*” (New York: Palgrave Macmillan, 2020), h. 173.

nasional, antara LSM nasional dan internasional, dan dengan politisi yang berbeda. Klaim gerakan masyarakat adat untuk demarkasi tanah mereka juga diartikulasikan ke masyarakat mayoritas Brasil yang lebih luas, termasuk secara global, misalnya melalui media massa internasional. Teknologi digital dalam bentuk platform media sosial ternyata memainkan peranan penting karena dapat menjangkau koneksi antara pengguna internet yang secara geografis letaknya berjauhan. Terakhir, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pribumi berdampak nyata pada politik di Brasil.

Literature Review terakhir berupa laporan tahunan (2020) yang berjudul “*Complicity in Destruction III: How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples’ Rights in the Brazilian Amazon*” (APIB dan Amazon Watch)¹¹. Penelitian ini menganalisis bagaimana jaringan lembaga keuangan internasional terkemuka terkait dengan konflik di tanah adat, deforestasi ilegal, perampasan tanah, melemahnya perlindungan lingkungan, dan konflik produksi dan ekspor komoditas. Temuan laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mewakili tiga sektor utama Brasil yaitu pertambangan, agribisnis, dan energi telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam konflik yang mempengaruhi masyarakat adat dan wilayah mereka. Selain itu, temuan penulis juga mengidentifikasi enam lembaga keuangan utama yang berbasis di Amerika Serikat seperti Black Rock, Citigroup, JPMorgan Chase, Vanguard, Bank of America, dan Dimensional Fund Advisors yang menyumbang lebih dari US\$18 miliar (100 miliar BRL) ke sembilan dari sebelas perusahaan yang diprofilkan

¹¹ APIB & Amazon Watch, “Complicity in Destruction III: How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples’ Rights in the Brazilian Amazon”, dalam *annual report of APIB*, 2020.

antara 2017 dan 2020. Jaringan ini menunjukkan perusahaan-perusahaan yang sangat bermasalah beroperasi di Amazon Brasil, mereka juga terjalin dengan para pemimpin keuangan global.

Perusahaan tersebut hanyalah beberapa dari banyak aktor yang terlibat dalam kehancuran Amazon Brasil saat ini. Mereka tidak beroperasi sendiri, dan tindakan mereka dipahami sebagai simbol dari tren yang semakin membahayakan hutan hujan di Amazon, yang secara bersamaan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat global. Pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang didokumentasikan dalam laporan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa investasi ekstensif dari para pemimpin keuangan internasional. Pasar global memiliki kekuatan untuk mengaktifkan atau memoderasi agenda atau rencana Amazon Bolsonaro yang memiliki otoritas dalam mengizinkan atau mencegah perusakan hutan hujan. APIB, Amazon Watch, dan koalisi sekutu Brasil dan internasional dalam hal ini berperan dalam menyerukan kepada pelaku pasar terkemuka untuk berhenti melakukan tindakan mereka dan berhenti membuat masalah di Brasil, sebaliknya sebaiknya menggunakan pengaruh mereka untuk menjadi mengambil bagian dalam menciptakan solusi. Selain itu, pengacara pribumi dan penasihat hukum APIB sekarang menjadi tim pembela hukum yang kuat di garis depan di Brasil.

Secara umum, penelitian-penelitian di atas membahas mengenai peran APIB dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan melindungi hutan hujan Amazon dan sekitarnya akibat demarkasi tanah dan deforestasi yang disebabkan oleh iklim politik Bolsonaro, masuknya jaringan keuangan

internasional di kawasan tanah adat, kemudian perjanjian EU-Mercosur yang juga dinilai tidak memberikan dampak lingkungan yang berkelanjutan di tanah masyarakat adat. Peran APIB yang ditemukan dalam penelitian di atas memberikan tambahan referensi bagi penelitian ini. Namun, di penelitian ini akan menguraikan peran APIB dengan konteks yang berbeda yang berfokus pada masa pemerintahan Bolsonaro. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kebijakan di masa pemerintahan Bolsonaro yang akan diuraikan dalam penelitian ini mendorong tingginya laju deforestasi di hutan Amazon Brasil yang kemudian mengancam hak-hak masyarakat adat yang tercantum dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Konvensi ILO (*International Labour Organisation*) No. 169. Dengan perbedaan konteks yang ada dalam melihat dan menekankan pada peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat adat akibat deforestasi di masa pemerintahan Bolsonaro dengan menggunakan pisau analisis konsep Masyarakat Sipil Global (*Global Civil Society*) dapat mengisi celah dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Nama	Judul	Metode	Hasil
Maryuri Mora Grisales dan Arquias Sófocles Guimarães Soares Cruz (2020)	<i>Being a Leader, A Woman and Indigenous: Three Challenges, Three Barriers</i>	Konsep & Teori: <i>Indigenous People</i> Metodologi: Kualitatif-Deskriptif (data juga didapatkan melalui wawancara)	Peran AAK dalam menumbuhkan kesadaran tersebut dengan melakukan kampanye di Eropa agar suara penduduk asli didengar dan mencegah pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan peningkatan aksi deforestasi. Aksi ini tidak hanya terhenti pada isu lingkungan saja, tetapi juga merambah pada isu sosial seperti rasisme. Dalam memerangi rasisme AAK memperluas aliansi dengan

			<p>organisasi dari segmen lain seperti Marcha das Mulheres Indígenas (Pawai Perempuan Adat) yang kami kaitkan hingga pertemuan Marcha das Margaridas (Pawai Bunga Aster), atau dengan Movimento Sem Teto (gerakan tunawisma), dan lain-lain. Kerja sama ini dilakukan agar aliansinya tetap kuat dan dapat berjuan bersama. Sedangkan peran dari organisasi pribumi Brasil seperti COIAB dan APIB yaitu menyediakan ruang hukum dan mengurus semua kebutuhan hukum masyarakat adat.</p>
<p>Emilia Hallström (2021)</p>	<p><i>Indigenous Interest in International Trade Governance: A Case Study of APIB and the EU- Mercosur Trade Agreement</i></p>	<p>Konsep & Teori: <i>Indigenous People, Subaltern Social Movement Theory.</i></p> <p>Metodologi: <i>Semi-Structured Interviews and Qualitative Thematic Textual Analysis</i></p>	<p>Temuan dari tesis ini mendapatkan bahwa APIB, menggunakan strategi framing, membangun aliansi dan membentuk koalisi advokasi transnasional untuk meningkatkan visibilitas kepentingan kelompok pribumi Brasil. Upaya framing dalam masalah lingkungan dan penggunaan norma-norma internasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Brasil, terutama pelestarian amazon untuk meningkatkan kepentingan APIB dalam menghentikan EU- Mercosur. Sedangkan dalam aksi koalisi yang dibentuk oleh APIB yaitu dengan menciptakan konflik di antara Negara-negara anggota UE yang mengakibatkan kebuntuan dalam proses ratifikasi. Situasi ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat adat Brasil dalam mencapai kepentingannya dari non-ratifikasi.</p>

<p>Camila Emboava Lopes dan Annika Egan Sjölander (2020)</p>	<p><i>Old Power Struggles and New Media Work: Indigenous Peoples Striving for Justice in Contemporary Brazil</i></p>	<p>Konsep & Teori: <i>Indigenous People, New Media Nation</i></p> <p>Metodologi: Kualitatif-Deskriptif</p>	<p>Temuan dari penelitian ini bahwa aktivis media APIB dan Radio Yandê mengonstruksikan suara pribumi dengan membuat klaim tegas tentang hak tanah yang mengacu pada ketergantungan mereka dengan tanah dan alam. Mereka juga mengusulkan dekolonisasi radikal atas makna kepemilikan tanah. Perjuangan klain tersebut memanfaatkan media digital dengan pola menyerukan dukungan, dorongan mobilisasi dan aliansi serta kinerja identitas dan klaim mereka.</p>
<p>APIB dan Amazon Watch (2020)</p>	<p><i>Complicity in Destruction III: How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples' Rights in the Brazilian Amazon</i></p>	<p>Konsep & Teori: <i>Indigenous People.</i></p> <p>Metodologi: Kuantitatif-Deskriptif (Data juga didapatkan melalui wawancara)</p>	<p>Temuan laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mewakili tiga sector utama Brasil yaitu pertambangan, agribisnis, dan energi telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam konflik yang mempengaruhi masyarakat adat dan wilayah mereka. APIB, Amazon Watch, dan koalisi sekutu Brasil dan internasional menyerukan kepada pelaku pasar terkemuka untuk berhenti memicu masalah dan menggunakan pengaruh mereka untuk menjadi bagian dari solusi. Selain itu, pengacara Pribumi dan penasihat hukum APIB sekarang menjadi tim pembela hukum yang kuat di garis depan di Brasil.</p>

1.5. Landasan Teori

Global civil society atau masyarakat sipil global merupakan salah satu kajian dalam studi ilmu hubungan internasional. Istilah *civil society* sendiri telah mengalami perbedaan makna dari waktu ke waktu. Bagi para pemikir modern awal, seperti Thomas Hobbes dan Locke mendefinisikan *civil society* sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ‘*state of nature*’.¹² Tidak ada perbedaan antara masyarakat sipil dan Negara yang dibentuk melalui kontrak sosial dan yang diatur oleh undang-undang.¹³ Pada abad ke-19, ahli teori politik seperti Hegel dan Thomas Paine, menarik perbedaan antara Negara dan masyarakat sipil. Menurut Hegel, masyarakat sipil terpisah dari sekaligus sebagai ranah perantara antara keluarga dan Negara. Definisi mengenai masyarakat sipil yang digagaskan oleh Hegel mencakup bidang ekonomi.¹⁴ Dalam karyanya dengan tema besar *Civil Society*. Hegel menjelaskan bahwa masyarakat sipil sebagai gambaran antara konflik dan fragmentasi kepentingan-kepentingan ekonomi, agama, juga solidaritas kesukuan yang diorganisir dan diperjuangkan.

Definisi tersebut kembali dipersempit pada abad ke-20 oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci masyarakat sipil adalah ranah budaya, ideologi dan perdebatan politik yang berada di luar negara, pasar dan keluarga.¹⁵ Untuk waktu yang lama, gagasan mengenai masyarakat sipil terikat pada batas teritorial. Pada paruh kedua abad kedua puluh, seperti aspek-aspek lain dari lingkungan manusia,

¹² Adrian Kastrati, “Civil Society from Historical to Contemporary Perspectives”, dalam *European Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 1, h. 64-68.

¹³ Mary Kaldor, “The Idea of Global Civil Society”, dalam *International Affairs*, Vol. 79, No. 3, (2003), h. 583-593.

¹⁴ Neelmani Jaysawal, “Civil Society, Democratic Space, and Social Work”, dalam *Sage Open*, Vol. 3, No. 4, (2013), h. 1-12.

¹⁵ Mary Kaldor, 2003.

masyarakat sipil mulai mencapai dimensi global karena meningkatnya keterkaitan, meningkatnya perjalanan dan komunikasi. Munculnya internet dan globalisasi berikutnya setelah tahun 1990 telah membentuk masyarakat sipil pada postur yang jauh lebih mengglobal. Meskipun benar-benar salah untuk menganggap masyarakat sipil global (gerakan, kelompok, organisasi, lembaga yang beroperasi di tingkat global) sebagai produk setelah paruh kedua abad kedua puluh, tetapi jumlah dan diskusi tentang merekalah yang telah berkembang. sejak pertengahan abad kedua puluh. Masyarakat sipil global dapat didefinisikan sebagai “sektor ketiga” di tingkat global, yang dibedakan dari sekaligus alternatif dari tatanan internasional yang berpusat pada negara dan jaringan pasar global.¹⁶

Anheier, Galsius dan Kaldor telah memberikan definisi deskriptif mengenai masyarakat sipil global, mereka mendefinisikan masyarakat sipil global sebagai:¹⁷

“the sphere of ideas, values, institutions, organisations, networks, and individuals located between the family, the state, and the market and operating beyond the confines of national societies, polities, and economies”.

Masyarakat sipil global terlibat dalam kegiatan yang: (a) *Addresses transworld issues*; (b) *involves transborder communication*; (c) *has a global organisation*; dan (d) *works on a premise of supranational*.¹⁸ Masyarakat sipil global berbeda dengan masyarakat sipil domestik dalam artian mereka hanya

¹⁶ Neera Chandhoke, “The Limits of the Global Civil Society”, dalam *Global Civil Society Yearbook 2002*, diedit oleh Marlies Glasius, Mary Kaldor dan Helmut Anheier, (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 35-53.

¹⁷ Helmut Anheier, Marlies Glasius & Mary Kaldor. “*Global Civil Society 2001*”, (Oxford: Oxford University Press, 2001).

¹⁸ Jan Aart Scholte, “Global Civil Society: Changing the World”, dalam Working Paper, *Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR)*, (1999).

memiliki satu atau beberapa dari keempat karakteristik ini. Karena kepentingan dan nilai bersama mereka, kelompok dan organisasi yang berbeda serta warga negara dari negara yang berbeda menentang batas nasional mereka dan berkumpul untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan sosial, politik dan ekonomi di tingkat internasional dan dengan demikian menjadi bagian dari masyarakat sipil global. Komunitas epistemik masyarakat, jaringan advokasi transnasional, gerakan sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah beberapa contoh dari masyarakat sipil global.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai teknik penelitian yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian dengan cara yang efisien dan koheren, teknik ini bersifat intuitif dan sistematis.¹⁹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis terkait fenomena, aktivitas-aktivitas, serta proses-proses-sosial yang terjadi. Menurut Norman Denzin dan Yvona Lincoln, tradisi penelitian kualitatif yaitu dalam bidang lintas disiplin ilmu sosial. Penelitian kualitatif lebih meletakkan dasar pemikiran analisisnya pada penafsiran, serta hubungan yang berupa interaksi antara teori dan studi penelitian.²⁰ Sedangkan menurut Liz Spenser, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif dan sejarah orang dalam

¹⁹ John C. King, *Qualitative Research In Method In International Affairs For Master Students*, <https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf>, diakses pada 18 April 2020

²⁰ Piergiorgio Corbetta, *Social Research: Theory, Methods and Technique*, SAGE Publications, London, 2003, Hal. 48.

konteks dan sering ditandai dengan concern untuk menemukan perspektif aktor, metode konteks-sensitif dan semi-terstruktur, kaya dengan data, penjelasan di tingkat makna serta bagaimana dan mengapa pertanyaan diajukan.²¹

Secara umum metode penelitian kualitatif dalam hubungan internasional merujuk pada pengumpulan data dan teknik analisis data, yang tidak bergantung pada data numerik. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pemahaman mengenai dunia di sekitar kita, sehingga mengharuskan kita untuk berfokus pada makna dan proses yang membentuk hubungan internasional.

Penelitian kualitatif sering mengandalkan penalaran induktif. Hal ini karena penelitian kualitatif pada umumnya menghasilkan proporsi teoritis baru dari pengamatan empiris yang telah dilakukan.²² Penelitian ini juga merupakan tipe penelitian deskriptif yang akan menjelaskan mengenai keseluruhan yang berkaitan dengan dampak deforestasi pada keberlangsungan hidup masyarakat adat serta mengkaji mengenai peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia akibat deforestasi pada masyarakat ada di Brasil. Metode ini dianggap relevan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena akan melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis data terhadap fenomena dan aktor yang berperan dalam studi penelitian yang diangkat, kemudian mengkaitkannya dengan konsep atau teori sehingga memunculkan kesimpulan untuk membuktikan kebenaran hipotesis penulis.

²¹Liz Spencer (Et Al), *Quality In Qualitative Evaluation : A Framework For Assessing Research Evidence*, The Cabinet Office, London, 2003, Hal. 3.

²² Alan Bryman, *Social Research Methods*, Oxford University Press, New York, 2012, Hal. 380.

1.6.2. Metode Analisis

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif merupakan suatu teknik dalam mengkaji suatu permasalahan dengan cara melakukan penggambaran untuk dapat memahami perilaku yang menjadi objek yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa kualitatif. Metode ini bersifat memaparkan, menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara nyata dan bersifat objektif, sedangkan objek yang menjadi fokus analisis bersifat holistik atau secara menyeluruh (tidak dapat dipisahkan, sehingga peneliti akan meneliti secara keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat, aktor atau pelaku dan aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain secara sinergis.²³ Pada penelitian ini yang menjadi fokus analisis berupa Dampak deforestasi terhadap masyarakat adat dan peran *Articulation of Indigenous Peoples of Brazil* (APIB) terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Deforestasi pada Masyarakat Adat di Brasil. Selain itu, penulis juga menggunakan cara berpikir deduktif untuk mendapatkan kesimpulan perilaku dari variabel atau aktor yang diteliti.

1.6.3. Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini tingkat analisa sangat penting untuk menjelaskan fenomena penelitian yang berkaitan dengan ilmu Hubungan Internasional. Tingkat analisa akan mempengaruhi sedalam apa ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Adapun variabel analisis dalam penelitian ini ialah level organisasi

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hal. 207.

internasional non-negara (*Articulation of Indigenous Peoples of Brazil* atau APIB).

1.6.4. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif sehingga hanya menjelaskan satu variabel yaitu variabel independen (bebas) atau variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab dari berubahnya variabel lain. Dalam hal ini, peneliti hanya akan menguraikan peran APIB dalam mengatasi pelanggaran HAM akibat deforestasi bagi masyarakat adat di Brasil.

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah batasan materi dan batasan waktu. Tujuan dibuatnya ruang lingkup pembahasan ialah untuk memudahkan penulis dalam merumuskan analisisnya agar lebih fokus atau memberikan ruang lingkup yang jelas terhadap pokok permasalahan yang diteliti.

A. Batasan materi

Batasan materi berguna untuk menunjukkan menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang akan dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau objek studinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai implementasi pisau analisis berupa *Global Civil Society* dan menjelaskan peran APIB sebagai organisasi non-pemerintah di Brasil dalam mengadvokasi isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, terutama pelanggaran yang disebabkan oleh aktivitas deforestasi sebagai implikasi dari kebijakan Bolsonaro.

B. Batasan Waktu

Batasan waktu diperlukan untuk mengkaji rentang waktu yang dikaji penulis dalam karya ilmiahnya. Rentang waktu pada karya ilmiah ini dimulai pada tahun 2019 sampai dengan masa pemerintahan presiden Brasil, Jair Bolsonaro. Penulis memilih tahun 2019 karena pada tahun inilah awal masa pemerintahan Jair Bolsonaro yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya terdapat kebijakan-kebijakan yang berujung pada aktivitas deforestasi.

1.6.6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) atau melakukan observasi secara tidak langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah sejumlah literatur yang tersedia berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian, seperti penelitian-penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal-jurnal dengan tema yang relevan, makalah, artikel, dan surat kabar. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik *secondary analysis*. Analisis data sekunder merupakan teknik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada baik penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maupun penelitian yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik untuk meneliti pertanyaan baru maupun untuk meneliti pertanyaan utama yang digunakan sebagai keperluan pembuktian.²⁴ Menurut Vogel Hinds, tujuan analisis data sekunder adalah untuk mengaplikasikan titik ulasan alternatif

²⁴ Janet Heaton, *Reworking Qualitative Data*. SAGE Publications Ltd, London, 2004, Hal. 1.

(*alternative point of review*) atau pandangan baru atas data dan sumber yang telah terkumpul.²⁵

1.6.7. Argumen Pokok

Berdasarkan pada penjabaran di atas, penelitian akan menggunakan konsep yang telah dijelaskan untuk menyusun argumentasi bahwa peran aktor organisasi non-negara memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti beranggapan bahwa *peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di Brasil akibat deforestasi yaitu dengan menyediakan kebutuhan hukum bagi masyarakat adat dan memobilisasi masyarakat adat. Selain itu APIB berkoordinasi dengan organisasi lokal masyarakat adat, organisasi lokal sosio-lingkungan serta organisasi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk melawan ancaman dan penyerangan terhadap hak-hak masyarakat adat di Brasil.*

²⁵ Vogel Hinds (Et L), *The Possibilities And Pitfalls of Doing Secondary Analysis of Qualitative Dataset*, dalam *Qualitative Health Research*, Vo. 7 No.3, 1997, Hal. 408-424.